

ABSTRAK

Menurut UU Perkawinan anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, akan tetapi dalam KUHPperdata anak luar kawin tidak memiliki hubungan perdata baik dengan ayah maupun ibunya, sehingga mereka harus melakukan pengakuan anak luar kawin. Adanya upaya tersebut menimbulkan suatu akibat hukum perwalian untuk melakukan perbuatan hukum seperti jual tanah atas nama anak dibawah umur. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis proses pengakuan dan perwalian anak luar kawin atas izin jual tanah dengan menggunakan studi kasus Putusan Nomor: 456/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst dan Putusan Nomor: 92/Pdt.P/2014/PN.Btm.

Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dengan menggunakan pengumpulan data *literatur library* (kepuustakaan) dan dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan suatu data ke dalam suatu kalimat yang teratur, logis, lengkap, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman hasil analisis.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengakuan anak luar kawin dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri dengan memenuhi segala syarat dan tata cara yang ditentukan. Seperti halnya Pemohon dalam Putusan Nomor 456/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst yang dikabulkan oleh Hakim. Kemudian, pengakuan tersebut dilaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatatkan dan diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan. Akibat hukum dari adanya pengakuan dapat ditemui dalam Putusan Nomor 92/Pdt.P/2014/PN.Btm, dimana pengakuan oleh Ayah atau Ibu bertanggungjawab penuh atas semua perbuatan anak luar kawin diakui yang berstatus dibawah umur didalam maupun diluar pengadilan termasuk mewakili anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum yaitu jual tanah milik anak demi kepentingan yang terbaik demi anak. putusan ini sebagai bentuk perlindungan hukum bagi sang anak dan sebagai bukti sah yang diperlukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam proses pembuatan akta jual beli hak atas tanah.

Kata Kunci: Anak Luar kawin, Pengakuan, Perwalian, Jual Tanah.

ABSTRACT

According to the Marriage Law (UU Perkawinan), illegitimate children only have a civil relationship with their mothers and their maternal families. However, under the Civil Code (KUHPerdara), illegitimate children do not have a civil relationship with either parent, necessitating the process of recognizing illegitimate children. This effort results in a legal consequence of guardianship, enabling legal actions such as selling land on behalf of the underage child. Therefore, this research aims to comprehend and analyze the processes of recognition and guardianship of illegitimate children for land sale permission, utilizing a case study approach with Decision Number: 456/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst and Decision Number: 92/Pdt.P/2014/PN.Btm.

The legal writing employs a juridical-normative approach with a descriptive analysis research specification. The data used are secondary data obtained indirectly through literature collection from the library and are analyzed qualitatively by presenting data in an organized, logical, comprehensive, and effective sentences to facilitate the understanding of the analysis results.

The results of this research show that the acknowledgment of an extramarital child can be carried out through the District Court by fulfilling all specified requirements and procedures. Just like the Applicant in Decision Number 456/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst, which was granted by the Judge. Subsequently, the acknowledgment is reported to the Office of Population and Civil Registration to be recorded, and an Extract of Acknowledgment Deed is issued. The legal consequences of acknowledgment can be found in Decision Number 92/Pdt.P/2014/PN.Btm, where the acknowledgment by the father or mother holds full responsibility for all actions of the acknowledged extramarital child who is underage, both inside and outside the court, including representing the child in legal actions such as selling the child's land for the best interests of the child. This decision serves as a form of legal protection for the child and valid evidence required by the Land Deed Official (PPAT) in the process of making a deed for the sale and purchase of land rights.

Keywords: Illegitimate Children, Recognition, Guardianship, Land Sale.